
Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh dan Perkembangannya Dalam Perspektif Rencana Tata Ruang Kota (Kasus Studi : Kawasan Kumuh Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)

¹Suhardi ; ²Zefri ; ³Kasman

^{1,2,3} Prodi Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah, Pascasarjana
Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
suhardi02@gmail.com

ABSTRACT

Many factors can affect the existence of slum areas. These factors include urbanization, infrastructure, economy, urban land, spatial planning, urban attractiveness, socio-cultural, building ownership status and length of stay. urban attractiveness, socio-cultural, building ownership status and length of stay of residents. occupants. From the description of the problem of slum areas in West Bekasi, the purpose of this study is to analyze the Socio-Economic conditions of the Slum Area Community and its Development When Viewed from the Aspects of the City Spatial Plan. To answer the problem formulation and objectives in this research, the researcher uses a Qualitative Method using a case study approach, which is intended to explore the socio-economic conditions of the community in the West Bekasi Slum Area, by means of interviews and observations during the research. The analysis tool used is through three stages: Data Reduction; Data Presentation and Conclusion Drawing or Verification. The research results of the Socio-Economic Condition Analysis of Communities in Bekasi City Slums are as follows: 1. The Socio-Economic Condition of the West Bekasi Slum Area, can be described as a poor neighborhood, due to low income levels, low education levels, odd jobs such as laborers, gojek drivers. The majority of residents are migrants from around outside Bekasi city; 2. From the aspect of ownership, most of them are self-owned, but some of their land status is not certified but is legal because it is in the form of girik. Due to low incomes, generally below Rp.1,000,000 per month, in addition to low education levels, their attention and knowledge are limited in maintaining a clean environmental lifestyle or free from slums; 3. There are three (3) important points that are of concern in dealing with socio-economic issues in the West Bekasi Slum, namely; a. Public awareness in the slum area, in terms of maintaining cleanliness and public order Rehabilitation efforts by the government (already underway) on the supporting infrastructure of a clean and healthy area, such as building conditions, environmental roads, drainage, garbage, green spaces and fire protection tools that must be available in the slum area; c. Efforts in the field of slum management, in a more humane manner and considering the best way out and in favor of the interests of the people living in the slum area and d. The analysis of the spatial plan, showing that the slum area is not only a slum area, but also a slum area. Taking into account the analysis of the spatial plan, it shows that explicitly the pattern and characteristics of slum areas are not contained in the Bekasi city spatial

pattern plan in detail, but are described in the density of buildings in each sub-district including West Bekasi Sub-district.

Keyword : Socio-economic Condition of the Community ; Slum Area ; City Spatial Plan

ABSTRAK

Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh orang-orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana prasarana yang minim. Di Bekasi Barat terdapat terdapat 430,61 ha permukiman kumuh yang tersebar di 12 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Bekasi Barat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh. Faktor-faktor tersebut antara lain urbanisasi, sarana prasarana, ekonomi, lahan perkotaan, tata ruang, daya tarik perkotaan, sosial budaya, status kepemilikan bangunan dan lama tinggal penghuni. Dari gambaran permasalahan kawasan permukiman kumuh di Bekasi Barat, maka tujuan dalam penelitian ini adalah” untuk menganalisis kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh dan Perkembangannya Bila Ditinjau dari Aspek Rencana Tata Ruang Kota. Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan Metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan study kasus, yang dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Kumuh Bekasi Barat, dengan cara interview dan observasi selama penelitian berlangsung. Alat Analisis yang digunakan adalah yaitu melalui tiga tahapan: Reduksi data; Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Hasil penelitian Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Permukiman Kumuh Kota Bekasi diperoleh sebagai berikut : 1. Kondisi Sosial Ekonomi Kawasan Kumuh Bekasi Barat, dapat disikripsikan dengan perkamungan miskin, karena tingkat pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang juga rendah, jenis pekerjaan yang serabutan seperti buruh, tukang gojek. Mayoritas penduduk adalah pendatang dari sekitar luar kota Bekasi; 2. Dari aspek kepemilikan sebaigian besar adalah milik sendiri namun sebaigian status tanah mereka tidak bersertifikat namun legal karena dalam bentuk girik. Karena pendapatan yang rendah umumnya di bawah Rp.1.000.000/ bulan disamping tingkat pendidikan yang rendah, maka perhatian dan pengetahuan mereka pun terbatas dalam menjaga pola hidup lingkungan yang bersih atau bebas dari kekumuhan; 3. Ada tiga (3) point penting yang menjadi konsen dalam menangani persoalan sosial ekonomi di Permukiman Kumuh Bekasi Barat, yaitu; a. Kesadaran masyarakat di kawasan kumuh, dalam hal menjaga kebersihan dan ketertiban umum; b. upaya rehabilitasi oleh pihak pemerintah (sudah berlangsung) terhadap infrastruktur pendukung suatu kawasan yang bersih dan sehat, seperti kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase, sampah, RTH dan alat proteksi kebakaran yang harus tersedia di kawasan permukiman kumuh tersebut; c. Upaya di bidang penanggulangan permukiman kumuh, dengan cara yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan jalan keluar terbaik dan memihak kepada kepentingan

masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh dan d. Memperhatikan analisis rencana tata ruang, menunjukkan bahwa secara eksplisit pola dan karakteristik kawasan permukiman kumuh tidak terdapat dalam rencana pola ruang kota Bekasi secara detail,, namun yang dijabarkan dalam kepadatan bangunan yang ada disetiap kecamatan termasuk Kecamatan Bekasi Barat.

Kata Kunci : Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Kawasan Kumuh dan Rencana Tata Ruang Kota

PENDAHULUAN

Pemukiman kumuh adalah masalah yang dihadapi oleh hampir besar kota-kota besar di Indonesia, yang berdasarkan oleh hampir kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Pengkajian tentang permukiman kumuh adalah tiga segi, tampak yang rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi, dan limbah belum dikelola dengan baik.

Di Bekasi Barat, program penanganan perumahan kumuh berhasil mengurangi luas perumahan kumuh dari 443 ha pada tahun 2016 menjadi 287,2 ha pada tahun 2019. Program ini melibatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk penataan kawasan kumuh melalui berbagai upaya seperti perbaikan drainase dan penyediaan air bersih. Pendataan ulang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 430,61 ha perumahan kumuh yang tersebar di 12 kecamatan di Wilayah Kota Bekasi.

Permukiman kumuh di Bekasi Barat memiliki kondisi yang buruk dan dihuni oleh orang miskin dengan fasilitas yang minim. Kawasan ini tersebar di 12 Kecamatan, termasuk Kecamatan Bekasi Barat. Kualitas hunian bisa memengaruhi kesehatan dan perilaku penghuninya. Standar kepadatan

rumah di Bekasi Barat mengikuti Permen PU Nomor 20 Tahun 2011.

Standar kepadatan rumah Bekasi Barat akan mengacu kepada Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Standar Kepadatan Rumah di Kawasan Perkotaan

Tipologi Kepadatan	Standr (Rumah/Ha)
Sangat Tinggi	1.000
Tinggi	100 – 1000
Sedang	40 – 100
Rendah	10 – 40
Sangat Rendah	10

Sumber : Permen PU NO 20/2011 Tentan Pedoman RDTR dan Zoning Regulation

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh. Faktor-faktor tersebut antara lain urbanisasi, sarana prasarana, ekonomi, lahan perkotaan, tata ruang, daya tarik perkotaan, sosial budaya, status kepemilikan bangunan dan lama tinggal penghuni. Dari gambaran permasalahan kawasan permukiman kumuh di Bekasi Barat , maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah ” Bagaimana kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh dan Perkembangannya Bila Ditinjau dari Aspek Rencana Tata Ruang Kota.

KAJIAN TEORI

Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budayanya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada. Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya (Departemen PU, 2001)

Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan kebutuhan perikehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang.

Sesuai dengan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1, menerangkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarkis memiliki

hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarkis, baik antar kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi, dan struktur (keterkaitan jaringan infrastruktur dengan pusat permukiman dan jasa) (Departemen PU, 2001) Dalam UU No.26/2007 dinyatakan juga bahwa perencanaan tata ruang secara dapat diartikan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tata ruang dan zonasi adalah kriteria-kriteria yang disusun berdasarkan potensi *supply* dan potensi *demand* (Gold, 1980; Mac.Kinnon,J.et.al. 1986; Departemen Kehutanan, 1983). Potensi supply meliputi kondisi sumberdaya alam yang terdiri dari unsur fisik dan biologi yang mempunyai interaksi satu sama lainnya, mempunyai kemampuan tumbuh dan berkembang serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan potensi demand meliputi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta potensi wisatawan yang

dalam perkembangannya membutuhkan pasokan sumberdaya alam (potensi suply) yang memadai dan memerlukan pengaturan pemanfaatan agar dapat menjamin kelest. Berdasarkan beberapa penelitian, permukiman kumuh disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kepadatan penduduk, rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kepadatan bangunan, prasarana permukiman buruk, kondisi bangunan rumah tinggal yang buruk, aksesibilitas, dan sanitas lingkungan buruk (Sulestianson & Indrajati, 2013; Ramadhan & Pigawati, 2014; Santosa & Terik, 2016). Menurut penelitian (Wijayanti, Sutandi, & Pravitasari, 2020) bahwa yang mempengaruhi perkumuhan kumuh di Bekasi Barat adalah presentase anak penduduk miskin tidak bersekolah, jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, dan presentase bangunan hunian tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu kedekatan dan berbatas Bekasi Barat dengan DKI Jakarta juga memberikan pengaruh pada meningkatnya titik lokasi permukiman kumuh. Masyarakat cenderung akan menempati hunian jika dekat dengan lokasi kerja walaupun hunian tersebut tidak layak huni. Selain itu, Bekasi Barat adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Menurut Budiharjo (1997), permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan

dan penghidupan penghuninya (Budiharjo: 1997).

Poin penting yang dapat dipahami dari beberapa definisi dan pengertian tentang permukiman kumuh menurut beberapa ahli dan UU adalah bahwa “kekumuhan” harus ditangani dengan serius dengan strategi dan model penanganan yang baik dan tepat. Keberadaan kawasan permukiman kumuh dipertanian dapat menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah, baik ditinjau dari aspek keruangan, estetika, lingkungan dan sosial. (Yudohusodo, 1995). Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, karakteristik fisik alami.

Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan. Pertama, Model Land Sharing I, di mana lahan akan ditata ulang dengan mengembalikan lahan kepada masyarakat dengan luasan yang sama dengan sebelumnya. Syaratnya adalah tingkat kepemilikan yang tinggi, tingkat kekumuhan yang tinggi, dan pola bangunan yang tidak teratur. Kedua, Model Land Sharing II, yang melibatkan proses pembagian lahan antara pemilik lahan dan pemukim liar dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Ketiga, Model Land Readjustment, di mana lahan pertanian yang diperjualbelikan secara acak akan diatur ulang untuk meningkatkan kualitas permukiman. Berikutnya, Model Konsolidasi Lahan, yang melibatkan pengaturan kembali penggunaan lahan dan penguasaan bidang tanah untuk meningkatkan kawasan yang kurang memenuhi syarat. Semua model tersebut dilakukan dengan persetujuan semua pihak

yang terlibat serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian dan karakteristik permukiman kumuh seperti yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh merupakan lingkungan permukiman yang berkembang tanpa ada suatu perencanaan sehingga secara keseluruhan memiliki kondisi fisik bangunan yang tidak layak dihuni, kondisi bangunan yang saling berhimpitan satu dengan lainnya, tidak memiliki sarana dan prasarana pendukung permukiman yang memadai, memiliki tingkat kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk yang tinggi dan kebanyakan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kuesioner dan studi literature. Teknik wawancara / kuesioner dilakukan dengan cara menanyakan kebutuhan data penelitian secara langsung kepada narasumber yang dipilih. Sedangkan teknik studi literature menggunakan data sekunder yang didapatkan dari instansi pemerintahan, atau hasil penelitian yang sebelumnya. Pengumpulan data dengan dari studi literatur dan wawancara digunakan untuk memperkuat pembahasan faktor-faktor penentu dalam kawasan permukiman kumuh dan faktor yang dijadikan sebagai penentuan pola ruang dan struktur ruang dalam rencana tata ruang kota. Sedangkan teknik kuesioner digunakan sebagai input data/dasar dalam melakukan analisis deskriptif kualitatif.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu,

dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Analisis pada alur ini adalah mencari makna benda-benda dan peristiwa, pola-pola dan alur sebab akibat untuk membangun proposisi. Penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh dan RTR Kota Bekasi akan dilakukan dengan menggunakan analisis spasial dengan pendekatan GIS. Hasil dari analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menentukan faktor prioritas apa saja yang paling mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh di tiap kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Perda Bekasi Barat tahun 2016 memiliki faktor yang sama dengan pola dan distribusi yang berda untuk setiap wilayah kecamatan atau kelurahan. Stakeholder yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tat Ruang dan Infrastruktur Permukiman, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Badan Penataan Ruang dan Prasarana Kota), Akademisi dan tokoh masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Keputusan WaliBekasi Barat No. 600/Kep.375.A-Disbangkim/VI/2016, diperoleh kawasan kumuh sebanyak 203 lokasi kumuh yang tersebar di Bekasi Barat dengan total luas lahan seluas 443 Ha.

Dengan adanya kawasan kumuh tersebut maka terdapat beberapa penanganan kawasan kumuh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meliputi:

- Penangan berdasarkan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018
- Program Kotaku

- Rencana Kerja Disperkimtan sampai dengan tahun 2020 dan Penanganan tahun 2019
- Penanganan P3BK Tahun 2017 untuk lebih jelas mengenai kawasan kumuh di Bekasi Barat pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2. Surat Keputusan WaliBekasi Barat No. 600/Kep.375.A-Disbangkim/VI/2016

Kawasan Penanganan	Kelurahan	Kecamatan	Lokasi	Luas	Status	Titik koordinat	
						S	E
IV	Kota Baru	Bekasi Barat	RW 01	3	1.8	28"S	106°58'25.93"E
	Kota Baru	Bekasi Barat	RT 02, 08/12 & RT 02/10	7	0.4	7"S	106°57'21.06"E
	Bintara Jaya	Bekasi Barat	RT 01,09/10	2	2.1	2"S	106°56'59.58"E
	Kranji Purana	Jatisam	RT 1,2,3 RW 04	4	4.5	8"S	106°58'27.76"E
	Kranji Purana	Jatisam	RW 01	4	1.1	23"S	106°58'30.55"E
	Bintara	Bekasi Barat	RT 07/04		2,5	38"S	106°57'49.44"E
KOTA BEKASI				443	a	H	

Sumber : SK Kumuh Kota Bekasi, 2016

Maksud penghitungan kepadatan hunian dalam suatu rumah untuk mengetahui tingginya kepadatan manusia yang tinggal dalam satu rumah. Kepadatan hunian dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel yaitu jumlah penduduk dan jumlah rumah. Semakin banyak jumlah penduduk dan jumlah rumah maka kepadatan semakin tinggi dan sebaliknya. Angka kepadatan hunian didapatkan berdasarkan perbandingan jumlah rumah terhadap jumlah jiwa

penduduk dan juga jumlah rumah terhadap jumlah KK.

Kepadatan jiwa per rumah digunakan untuk mengetahui rata-rata banyaknya penduduk yang tinggal di dalam satu rumah. Pada dasarnya tujuan penghitungan kepadatan ini dapat digunakan untuk mengetahui kepadatan hunian berdasarkan jumlah penduduk dimana dapat digunakan juga sebagai indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah karena setiap

seorang manusia mempunyai batasan minimal luas tempat tinggal. Sedangkan kepadatan kepala keluarga per rumah digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah keluarga yang tinggal di dalam satu rumah.

Rumah dengan luas lantai yang sempit dan terbatas bila dihuni dengan jumlah individu yang besar individu umumnya akan menimbulkan pengaruh negative pada penghuninya. Hal ini terjadi karena dalam rumah tinggal yang terbatas umumnya individu tidak memiliki ruang atau tempat yang dapat dipakai untuk kegiatan pribadi. Keterbatasan ruang memungkinkan individu menjadi terhambat untuk memperoleh masukan yang berlebihan. Keadaan tersebut padea akhirnya menimbulkan perasaan sesak pada individu penghuni rumah tinggal

tersebut. Kepadatan tinggi merupakan stressor lingkungan yang dapat menimbulkan kesesakan bagi individu yang berada didalamnya, merupakan salah satu aspek lingkungan yang dapat menyebabkan stress, penyakit atau akibat-akibat negative pada perilaku masyarakat.

Berdasarkan data jumlah penduduk Bekasi Barat yang dirinci berdasarkan kelurahan dan jumlah rumah tiap kelurahan, maka dapat diketahui kepadatan hunian/rata-rata tingkat hunian Bekasi Barat tiap 1 unit rumah dihuni oleh 4 orang, sedangkan untuk kelurahan yang memiliki tingkat hunian 5 orang/rumah terdapat di Kelurahan Bintara. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kepadatan Hunian Bekasi Barat

o	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah	Kepadatan
			(orang)	Rumah (Rumah) b	Hunian Rumah/ Penghuni
			a		c
	Bekasi Barat	Bintara Jaya	34,815	12,786	3
		Bintara	68,900	13,131	5
		Kranji	52,441	12,130	4
		Kota Baru	49,832	12,735	4
		Jaka Sampurna	82,290	25,233	3
		Jumlah	288,278	76,015	4

Sumber : RP3KP Kota Bekasi

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah diiringi dengan timbulnya permasalahan sosial yang dihadapi oleh kawasan tersebut. Salah satu permasalahan sosial yang biasan ya timbul di daerah berkembang adalah masalah sampah. Jumlah sampah setiap tahun terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas

kehidupan masyarakat, dan disertai pola hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga masih cenderung konsumtif. Bekasi Barat yang secara adminisratif berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai kota megapolitan, menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang tidak ringan

mengingat pertumbuhan penduduk dan kegiatan perkotaan yang tinggi yang menyebabkan pada tingginya timbulan sampah di satu sisi dan di sisi lain terbatasnya lahan untuk pengelolaan sampah.

Pengelolaan Air Minum di Bekasi Barat saat ini dikelola oleh pemerintah (PDAM) dan pengelolaan swasta (PAM untuk perumahan) 2 perusahaan yang ada di bawah pemerintah yaitu PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot sedangkan untuk pengelola swasta tercatat ada di perumahan Kemang Pratama, Perumahan Green Garden dan Tirta Pondok Hijau (Bamus) kedua PDAM tersebut mempunyai batasan wilayah pelayanan. Dibawah ini adalah gambaran umum masing-masing pengelola Air bersih baik dari PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot maupun PAM Swasta.

Permasalahan kondisi air bersih Bekasi Barat, yaitu :

- Menurunnya kualitas air baku yang tersedia sehingga mempengaruhi air hasil produksi
- Penurunan kinerja dan keandalan akibat penurunan debit sumber air.
- Keterbatasan fasilitas produksi dan distribusi yang ada terhadap potensi sumber yang dimiliki (*idle* kapasitas).
- Terjadi selisih yang besar antara produksi air dan hasil pembacaan water meter pelanggan
- Water meter banyak yang rusak/hilang
- Tingginya kebocoran air pada pipa dan meter air pelanggan
- Kualitas air pada saat pendistribusian belum memenuhi syarat
- Pada umumnya lokasi kumuh belum di layani oleh penyediaan sistem perpipaan PDAM

- Sumber air bersih pada umumnya memanfaatkan air tanah
- Sebagian kualitas air tanah yang di pergunakan untuk MCK keruh dan berbau

Pengelolaan air limbah rumah tangga sebagian besar menggunakan septiktank dan sebagian lagi dialirkan ke saluran darinase atau dibuang langsung ke sungai. Masih terdapatnya rumah yang tidak memiliki MCK. Air buangan limbah domestik pada umumnya masih bersatu dengan saluran drainase. Terdapat beberapa septitank komunal tetapi belum maksimal dalam pengelolaannya.

Permukiman kumuh di Kelurahan Bekasi Barat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan penyuluhan kepada penduduknya tentang pemerataan penduduk, pengetahuan hukum, dan peningkatan kesadaran. Persoalan sosial ekonomi di permukiman diselesaikan dengan pendekatan sosial ekonomi agar fokus dan tidak menimbulkan konflik. Tiga poin penting dalam menangani persoalan ini adalah menjaga kebersihan, memberikan pelatihan keterampilan dan penyaluran tenaga kerja, serta menangani permukiman kumuh secara manusiawi dan mendukung kepentingan kaum migran. Terdapat pertentangan dalam permukiman kota antara pendatang dan masyarakat asli, menimbulkan krisis identitas dan meningkatnya kerawanan sosial. Data menunjukkan jurang antara golongan kaya dan miskin semakin melebar selama 15 tahun terakhir. Ada kelompok inti dengan pendapatan tinggi dikelilingi oleh massa pendatang yang mobile, menyebabkan keterbelakangan kota dan perilaku menyimpang yang mengancam keamanan dan ketertiban. Demikianlah analisis

terhadap persoalan sosial ekonomi di Permukiman Kumuh Bekasi Barat.

Konsep dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Bekasi Barat didasarkan pada kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kota Bekasi. Ada beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kumuh, seperti penanganan kumuh legal dengan penataan ulang perumahan, penanganan kumuh ringan dengan pemugaran bangunan, dan penanganan kumuh illegal dengan pemukiman ulang. Pencegahan dilakukan dengan pengawasan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Konsep peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh tidak hanya fisik, tapi juga nonfisik hingga tercapainya program Kota Tanpa Kumuh. Analisis kawasan kumuh juga dilakukan dalam perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi untuk mengatur distribusi ruang dan memastikan keseimbangan peruntukan ruang. Rencana pola ruang ini berdasarkan kebijakan penataan ruang, daya dukung wilayah kota, kebutuhan ruang untuk kegiatan, dan ketentuan hukum terkait. Pola ruang Kota Bekasi harus realistis, implementasikan dan mempertimbangkan karakteristik wilayah, daya dukung dan perkembangan masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Permukiman Kumuh Kota Bekasi, khususnya di Kecamatan Bekasi Barat, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berasal dari luar kota Bekasi dan memiliki tingkat pendidikan rendah serta pekerjaan yang serabutan. Kondisi ekonomi mereka juga rendah dengan pendapatan di

bawah Rp. 1.000.000 per bulan. Mayoritas memiliki kepemilikan rumah namun tanah mereka tidak bersertifikat. Perhatian terhadap kebersihan lingkungan terbatas karena keterbatasan pengetahuan. Untuk mengatasi persoalan ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, melakukan rehabilitasi infrastruktur, dan penanggulangan permukiman kumuh dengan pendekatan yang manusiawi dan pro-masyarakat.

Dari kesimpulan di atas, maka sebagai saran atau rekomendasi dalam penelitian ini, diharapkan : Pemerintah Kota Bekasi, diharapkan mampu menedukasi masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh, agar kehidupan lingkungan dan penduduknya, dimana Program Penanganan Kawasan Kumuh, sudah tidak lagi terfokus pada persoalan fisik semata, akan tetapi persoalan sosial ekonomi masyarakatnya yang harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Berry, David. 1983. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi (Penyunting Paulus Wirutomo). Rajawali : Jakarta.

Brotosunaryo, 2009. NVRP (Studi Kasus Kondominium/Apartemen di Kota Jakarta Pusat). Disertasi Tidak Diterbitkan, Program Doktor Arsitektur dan Perkotaan, Fakultas Teknik Universitas diponegoro : Semarang.

Budihardjo, E. 1998. Sejumlah Masalah Pemukiman Kota. Edisi Ketiga, Alumni : Bandung.

Clinard, Marshal B. 1968. Slums and Community Development. The Free Press, New York, Collier-Mac Millan : London.

Evers, Hans-Dieter. 1995. *Sosiologi Perkotaan*. LP3ES : Jakarta.

Handoko, Riwidikdo. (2013). *Belajar Muda Teknis Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta : Rohima Press. Kuntjaringanrat, 1984. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia : Jakarta.

Kusumah, Mulyana W. 1980. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Armico : Bandung.

Lee, Everett S. 1984. *Suatu Teori Migrasi*, terjemahan. Lembaga Kependudukan UGM : Yogyakarta.

Mangalam, J.J. 1968. *Human Migration : a Guide to Migration Literature in English*. Lexington : University of Kentucky.

Merton, Robert K. 1957. *Social Theory and Social Structure*, The Free Press : New York.

Nasikun. 1980. *Urbanisasi Berlebih, Involusi Perkotaan dan Radikalisme Politik di Negara-negara Berkembang*. Prisma 8 (6), LP3ES : Jakarta.

Reksodiputro, Marjono, 1990. *Masalah Kejahatan di Daerah Perkotaan*. PAU-IIS : Jakarta.

Sanduan, V. 2016. *Analisis Efektifitas Pembangunan Rusunawa Mariso Sebagai Alternatif Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus ; Kelurahan Bekasi Barat , Kecamatan Mariso, Kota Makassar)*. Universitas Bosowa : Makassar.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Soemadi. 1990. *Kebijakan Pembangunan Pemukiman di Perkotaan dan Peremajaan Pemukiman Kumuh*. Kantor Menteri Perumahan Rakyat, Jakarta.

Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian kualitatif. Kualitatif & R&D*. Bandung : Alfabeta

Susanto, Sri Soewasti. 1974. *Sanitasi Lingkungan di Kota-kota Besar*. Prisma 5, 1974, LP3ES : Jakarta.

Young, Elspeth. 1984. *Pengantar Kependudukan*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Zoebir, Zuryawan, I. 2008. *Perilaku Menyimpang Masyarakat Migran Pemukiman Kumuh Di Perkotaan, Studi Kasus : DKI Jakarta*. Jurnal (diterbitkan). Universitas Indonesia : Depok.

Maresty Krisandriyana1, Winny Astuti1, Erma Fitriarini 2019. *Faktor-yang mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta*. Jurnal Desa-Kota Volume 1, Nomor 1, 2019, 24-33.

Rindarjono, Mohammad Gamal. 2013. *Slum Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta : Media Perkasa.

Direktorat Pengembangan Permukiman. Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. *“Paduan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman*



JURNAL KAJIAN
WILAYAH DAN KOTA

Vol.3 No.1 Maret 2024
E-ISSN : **2829-1395**